

# GLOBALISASI DAN KEMISKINAN DESA

Abdur Rozaki\*

## Abstract

Modernization that creates globalization, in one hand, shed a light of hope on various easiness. In other hand, however, it also marginalize the poor (both people and states) to be kept in their marginal position.

Indonesia, which has struggled to escape from the monetary and economic crisis since the late of 1997, is finally entrapped in the deadly trap of the usurers of global capitalism. In this context Indonesia inevitably should accept the principles of free trade such as privatization, liberalization and deregulation in its politico-economy policies. That acceptance has resulted in the privatization of many stated-owned enterprises (BUMN, Badan Usaha Milik Negara), especially the enterprises engaged in strategic sectors such as telecommunication, water and oil. As the final result, various natural wealth, which ideally are used for the sake of public welfare, fall into foreign capitalists through their enterprises operating in Indonesia.

This paper attempts to discover what the negative impact of globalization for rural community is. It also offers solutions on what should the rural community do in their struggle toward self-empowerment, including through the development of supra structural and infrastructural basis as well as community-based leadership accompanied by certain contracts.

## I. Pendahuluan

Bila di masa Orde Baru 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila maka di era kepemimpinan SBY-JK tampaknya tanggal itu dapat diperingati sebagai hari duka dan nestapa masyarakat desa. Mengapa dapat dipersepsikan demikian? Karena pada tanggal 1 Oktober 2005, pemerintahan SBY-JK mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) melebihi

angka seratus persen. Minyak tanah yang dikonsumsi rakyat kebanyakan di pedesaan, yang semula Rp.1.200,-/liter naik menjadi Rp.2.500,-/liter harga pasaran. Bensin yang semula Rp.2.400,-/liter naik menjadi Rp.4.500,-/liter. Dengan kenaikan itu kontan saja membuat masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan, tercekik lunglai. Apalagi proses kenaikan itu hanya selang 4 hari memasuki bulan suci ramadhan. Seiring dengan kenaikan harga BBM, kontan saja harga bahan pokok dan barang lainnya menjadi naik, apalagi menjelang Idul Fitri. Pernyataan resmi pemerintah berkenaan dengan inflasi bulan Oktober berkisar 8,7 persen. Padahal selama 7 bulan terakhir sebelum kenaikan BBM inflasi hanya berkisar sekitar 7 persen. Jadi nilai inflasi selama 1 bulan kenaikan BBM saja masih belum dapat dibandingkan dengan nilai inflasi selama 7 bulan sebelum kenaikan BBM.

Pemerintah SBY-JK seolah tidak mau ambil peduli dengan berbagai saran, kritikan bahkan protes dari para pengamat sosial, pelaku usaha dan aktifis untuk menunda kenaikan BBM, setidaknya sampai dengan akhir tahun ini. Terlebih lagi angka kenaikannya juga begitu fantastis, jauh dari perkiraan banyak orang. Mengapa pemerintah membuat keputusan yang sangat tidak populis itu? Adakah tangan-tangan rezim kapitalisme global bermain? Apakah banyaknya para pedagang di pemerintahan SBY-JK berpengaruh terhadap kebijakan yang fanatis pada pasar? Tulisan ini akan mengurai pertanyaan itu dengan cara melihatnya dari adanya konstelasi ekonomi politik global dan makin melemahnya negara, khususnya seperti yang direpresentasikan oleh rezim SBY-JK serta bagaimana pula dampaknya bagi kehidupan masyarakat pedesaan.

Fokus isu ini menjadi penting karena sejak awal negara memberikan peranan yang begitu besar pada kekuatan pasar dan perannya sebagai pelindung rakyat makin melemah. Seperti yang ditunjukkan dalam penyusunan konsep dan implementasi kebijakan Bantuan Tunai Langsung (BLT) pada rakyat yang (di)miskin(kan) oleh kenaikan harga BBM. Lihat saja berbagai peristiwa politik yang bermunculan di desa pasca kenaikan BBM, yakni ketika pemerintah hanya sanggup memberi dana BLT kepada keluarga miskin sebagai dana kompensasi atas kenaikan BBM sebanyak 15,5 juta jiwa penduduk, sementara angka keluarga miskin di Indonesia hampir mencapai 40 juta jiwa. Belum lagi kekisruhan pendataan atas keluarga miskin yang dilakukan oleh BPS secara tidak profesional yang kemudian mengikutsertakan lurah desa dan RT dalam kemelut BLT ini.

Tak sedikit penduduk yang melakukan protes, kantor desa yang dirusak, ada pula perangkat desa yang ditusuk sampai meninggal oleh warganya. Bahkan dengan begitu dramatisnya ada pula ketua RT yang mengambil

jalan pintas, yakni melakukan bunuh diri di depan warganya dengan cara minum racun baygon.<sup>1</sup> Seiring dengan munculnya tragedi di atas, banyak perangkat desa dan juga RT yang mengundurkan diri atau tidak mau diikutsertakan dalam proses pendataan penduduk miskin karena memang disain, konsep dan implementasinya sangat diskriminatif, karitatif dan penuh dengan aroma konflik horisontal. Rakyat yang sudah dimiskinkan sebab kenaikan BBM, masih harus mengalami politisasi untuk saling beradu jotos dengan sesama kaumnya yang sama-sama juga miskin untuk berebut dana kompensasi BBM, senilai Rp.100 ribu perbulan yang dibayarkan selama 3 bulan sekali melalui Kantor Pos di tingkat Kecamatan. Penduduk berantrian berdesak-desakan di Kantor Pos sampai ada pula yang pingsan lalu meninggal dunia, seperti yang terjadi di Banyuwangi. Bahkan di luar Jawa, seperti di Kalimantan Tengah, warga harus menaiki perahu sampan dan dilanjutkan dengan melakukan perjalanan puluhan kilo meter menuju Kantor Pos yang memang jaraknya sangat jauh dari rumahnya.

## II. Membongkar Topeng Globalisasi

Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 1997, dan rezim Orde Baru gagal melakukan solusi pemulihan lalu meminta IMF sebagai 'dewa' penolong, Indonesia terperangkap ke dalam jebakan maut *rentenir global capitalism*.<sup>2</sup> IMF yang selama ini menjadi kekuatan mesin neoliberalisme bersama Bank Dunia dan WTO, atau dikenal sebagai *Unholy Trinity* makin mengepakkannya di Indonesia. Bantuan utang diberikan pada pemerintah Indonesia. Seiring dengan itu, prinsip-prinsip perdagangan bebas dimasukkan ke dalam penataan kebijakan ekonomi politik di Indonesia, seperti privatisasi, liberalisasi dan deregulasi.<sup>3</sup>

Praktis pergantian dari rezim-ke rezim di Indonesia di era reformasi tak mampu mengatasi kesulitan ekonomi akibat krisis karena seluruh agenda ekonomi politik diatur oleh agenda dan ritme irama *Unholy Trinity*, khususnya IMF. Berbagai perusahaan milik negara (BUMN) diprivatisasi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, air dan migas. Secara per-

<sup>1</sup> Lihat SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat, tanggal 7 – 20 Oktober 2005.

<sup>2</sup> Lihat tulisan Tony Prasetyantono, International Monetary Fund (IMF), dalam buku *Neoliberalisme*, (I Wibowo dan F.Wahono (eds)., (Yogyakarta: Cindelas, 2003), p. 107 – 123.

<sup>3</sup> Revrisond Baswir, "Bahaya Globalisasi Neoliberal Bagi Negara-Negara Miskin", *Makalah pada Trainig History of Thout (HOT)*, USC Satunama, tanggal 14-19November 2005. Bandingkan dengan William K Tabb, *Tabir Politik Globalisasi*, diterj. Uzair Fauzan,dkk, (Yogyakarta: Lafadz, 2003).

lahan peran negara dilucuti, digantikan oleh peran dan mekanisme pasar atau pemain swasta, yang kebanyakan pemodal atau perusahaan asing. Secara perlahan pula pasal 33 UUD '45 sebagai konstitusi atau dasar pijak pembangunan tata ekonomi nasional makin kehilangan rohnya. Konstitusi yang mengamanahkan bahwa "Bumi air dan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat", kini jatuh ke tangan para kapitalis asing melalui perusahaan-perusahaannya yang berkorporasi di bumi Indonesia. Lihat saja pasca perkembangan privatisasi air. Air yang dulunya bagi orang desa memiliki makna sosial, kini makin bermakna komersial, menjadi barang komoditi yang diperdagangkan oleh para investor perusahaan air minum. Di Kabupaten Sleman, debit simpanan air yang begitu kaya seiring dengan makin banyaknya perusahaan air minum yang beroperasi, para petani dan rumah hunian justru mengalami kelangkaan akan akses air. Konflik pun mulai bermunculan antara pemerintah yang memiliki PDAM, investor perusahaan air minum dengan organisasi petani dan rumah hunian masyarakat.<sup>4</sup>

Begitu pula dengan privatisasi migas, membuat negara harus mencabut subsidi atau bentuk perlindungan harga atas rakyatnya dalam mengakses BBM. Harga BBM dipacu agar mengalami kesepadanan dengan harga BBM seperti di negara-negara maju atau dapat juga disebut sebagai internasionalisasi harga. Di tengah proses itu pula perusahaan asing, seperti Shell mulai beroperasi di Indonesia. Pasca diumumkannya kenaikan BBM 1 Oktober lalu oleh pemerintah, dalam hitungan minggu kemudian di daerah Karawaci Tanggerang, Shell membuka SPBU pertamanya. Direncanakan dalam satu tahun ke depan akan dibangun pula 400 SPBU diberbagai tempat di Indonesia.<sup>5</sup> Perusahaan minyak Petronas milik pemerintah Malaysia juga berminat untuk berinvestasi berebut pasar minyak di Indonesia.

Bila selama ini perusahaan asing, seperti Shell, Exxon, Freeport dan lainnya hanya melakukan eksploitasi sumber daya alam sebatas mengolah bahan mentah maka kini dengan bendera pasar bebas neoliberalisme

---

<sup>4</sup> Lihat, Mimin Dwihartono, "Konflik Pengelolaan Air di Umbul Wadon : Upaya Membangun Gerakan Sosial di Hulu-Hilir", dalam *Jurnal Mandatory, Politik Perlawanan*, Edisi 2/Tahun 2/2005., p. 89-100.

<sup>5</sup> Globalisasi sebagai sebuah konsep memiliki banyak wajah, yakni geopolitik dan teknologi serta ekonomi dan budaya. Dalam perkembangan 'wajah' itu mengalami ideologisasi imperialism berupa penaklukan ekonomi politik atas negara-negara berkembang (baca: pinggiran). James Petras dan Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked : Imperialism in the 21<sup>st</sup> Century*, diterj. Agung Prihantono, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003).

mereka kini memiliki kebebasan mengolahnya menjadi aneka bahan produk jadi dan memasarkannya langsung pada konsumen Indonesia. Kompetisi, persaingan bebas yang selama ini menjadi jargon *global capitalism* dicekokin ke berbagai negara dengan kedok sebagai arena pemberi keadilan, kemajuan dan kemakmuran.<sup>6</sup> Padahal jargon itu hanya berupa mitos yang hanya menguntungkan negara maju dan membuat bulan-bulanan negara berkembang seperti Indonesia. Konteks ketidakadilan dalam pasar bebas ini diilustrasikan dengan baik oleh Prof Arief Budiman dalam bentuk pertandingan antara srigala (baca: negara maju) dengan kucing (baca: negara berkembang) di medan laga. Menurutnya, jangankan diadu untuk bersaing, melihat srigalanya saja sang kucing pasti takut dan lari duluan.

Kekhawatiran banyak pihak makin mendekati kenyataan, dengan makin melemahnya proteksi negara atas rakyatnya, di tengah banjirnya perusahaan asing dengan segala produknya maka tidak menutup kemungkinan satu persatu usaha rakyat akan rontok dan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan asing yang begitu komplet kemampuannya, yakni dari segi modal, jaringan dan ketrampilan profesional. Kita pun akan terancam menjadi asing di rumah sendiri. Terancam makin mengalami kemiskinan dan berbagai beban penderitaan lainnya. Modal produksi masyarakat makin tergerus, sementara harga konsumsi hidup makin tinggi dan sulit untuk diakses. Miminjam istilah Prof Dawam Rahardjo, dengan realitas ini orang Indonesia dapat saja menjadi gelandangan di negerinya sendiri.

Korban pertama dan utama dari realitas ketimpangan yang diciptakan oleh rezim global dan negara yang lebih berpihak pada pasar adalah masyarakat pedesaan. Mengapa? Di antaranya adalah: *Pertama*, sumber daya alam itu berlokasi di dalam lingkungan masyarakat pedesaan. Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harusnya lebih dulu memakmurkan orang desa, justru sebaliknya makin memarginalisasikan atau memiskinkan orang desa. Tidak sedikit dengan beroperasinya perusahaan asing di lingkungan desa atau masyarakat adat, khususnya kasus tambang dan migas, komunitas adat atau desa menjadi korban.<sup>7</sup> Seperti kasus minamata di desa Buyat Sulawesi Tenggara. Eksploitasi hutan

---

<sup>6</sup> Abdur Rozaki, "Gerbang Dayaku : Kisah Pembangunan Perdesaan di Kutai Kartanegara", *Laporan Penelitian Prakrsa dan Pembaharuan Pemerintahan Desa*, tahun 2005. Kerjasama IRE Yogyakarta dengan Yayasan TIFA Jakarta.

<sup>7</sup> Bonie Setiawan, *Globalisasi Pertanian*, The Institute for Global Justice; Jakarta, 2003.



di Kalimantan dan Sumatera yang merusak sistem ekologis dan kosmologis masyarakat adat setempat.

*Kedua*, makin rontoknya institusi dan kelembagaan masyarakat lokal oleh proses dan mekanisme pasar dan negaranisasi. Kelembagaan ekonomi dan budaya masyarakat desa makin tergerus dan kalah bersaing dengan produk industri pasar yang ditopang oleh kebijakan negara yang tidak berpihak pada orang desa, seperti terus melemahnya produksi dan harga jual pertanian.<sup>8</sup> Bila pelaku usaha industri dan perbankan selalu memperoleh kemudahan dalam mengakses permodalan bahkan pengampunan utang, seperti Credit and Discharge di masa Presiden Megawati, sedangkan petani yang hidup di lingkungan pedesaan nyaris tanpa perlindungan. Baik pasar atau pun pemerintah sampai dengan saat ini tidak juga bersedia membuat kebijakan untuk melindungi petani ketika gagal panen akibat tidak menentukannya musim atau gangguan hama melalui program asuransi musim untuk petani. Padahal dengan asuransi musim ini petani nantinya tidak mudah bangkrut dan jatuh miskin.

*Ketiga*, hampir 60 % penduduk Indonesia berada dan tinggal di pedesaan. Ini artinya mayoritas dari penduduk Indonesia yang secara konstitusi adalah rakyat yang memiliki kedaulatan. Namun kedaulatan politik dan ekonominya telah (di)habis(i) oleh kedaulatan pasar dan *rent – seeker* di lingkungan pemerintahan. Orang desa yang mayoritas itu kini kehilangan *voice*, akses dan kontrolnya terhadap tata kelola ekonomi politik di dalam lingkungan masyarakat dan bangsanya. Dalam konteks itu pula mayoritas kemiskinan penduduk di Indonesia berada di lingkungan pedesaan. Seperti yang diurai oleh Amartya Sen (1999), peraih hadiah nobel ekonomi 1997, di dalam bukunya *Development as Freedom*, bahwasannya kemiskinan itu terjadi karena ketiadaan akses dan kontrol kaum miskin atas sumber daya.

### III. Pseudo Desentralisasi dan Demokrasi

Banyak pihak mengatakan bahwa krisis ekonomi politik yang berakhir dengan tumbanganya rezim Orde Baru solusi strategisnya adalah dengan mengibarkan bendera desentralisasi dan demokratisasi di dalam tata kelola pemerintahan era reformasi. Di berbagai tempat di belahan dunia lainnya untuk mengatasi perpecahan antara kelompok politik di dalam masyarakat akibat belenggu sentralisme adalah dengan memberikan desentralisasi

---

<sup>8</sup> Andreas Follesdal ., "Survey Article: Subsidiarity," *The Journal of Political Philosophy* 6 (2), 1998.

politik dalam pengelolaan tata pemerintahan. Dalam konteks ini pemerintah daerah yang selama ini tidak memiliki ruang dan kebebasan, dalam paradigma desentralisasi memperoleh kewenangan.

Desentralisasi secara konseptual memang berupaya untuk lebih mendekatkan negara terhadap masyarakatnya. Dengan cara ini pemerintah lebih responsif dalam mengakomodasi aspirasi dan tuntutan yang berkembang di dalam masyarakatnya. Bahkan di dalam desentralisasi berkembang pula konsep *subsidiarity*,<sup>9</sup> yakni masyarakat atau bagian pemerintah terkecil di dalam struktur pemerintahan dapat mengambil peranan secara langsung dalam mengurus atau memberikan pelayanan publik tanpa harus menunggu komando atau instruksi pemerintahan yang berada di level atasnya. Misalnya, kalau urusan pelayanan publik itu dapat dilakukan oleh pengurus RT atau di tingkatan lurah desa maka tidak perlu harus dibawa atau menunggu instruksi kecamatan, kabupaten dan seterusnya.

Desentralisasi dengan demikian juga berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan efisien sehingga memberikan kepuasan terhadap warga negara. Bila proses desentralisasi seperti ini berlangsung maka dampak politiknya adalah posisi negara atau pemerintah benar-benar kokoh legitimasinya di hadapan warganya. Negara memiliki martabat (*dignity*) dan kehormatan di hadapan rakyat sehingga tidak rentan untuk dilecehkan, apalagi digulingkan oleh kekuatan protes massa. Posisi antara negara atau pemerintahan dengan warganya tidak ada jarak social (*social distance*) karena di dalamnya selalu mengandaikan adanya proses dialogis antara apa yang menjadi kebutuhan warga dengan apa yang menjadi kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.<sup>10</sup>

Sayangnya konsep desentralisasi yang demikian itu tidak berjalan dalam pelaksanaan otonomi daerah sejak rezim pemerintahan reformasi mengambil peranan politik di Indoensia. Rezim Habibie yang mengulirkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah melalui diterbitkannya UU No.22 tahun 1999 hanya mendorong desentralisasi itu di level kabupaten belum sampai ke pemerintahan terkecil, yakni level desa. Lebih ironis lagi,

---

<sup>9</sup> Hambleton Burn, D.R dan Hoggett, P, *The Politics of Desentralization*, (London: Macmillan, 1994).

<sup>10</sup> James Manor, *The Political Economy of Democratic Decentralization: Direction in Development Series*, (Washington DC: Word Bank, 1999)

praktek desentralisasi belum menyentuh otonomi komunitas karena berhenti hanya pada pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Praktek desentralisasi semacam ini sebenarnya *pseudo* desentralisasi, yaitu desentralisasi yang semu dan palsu karena di dalamnya telah direduksi.<sup>11</sup> Tak heran bila di berbagai tempat di Indonesia, desentralisasi semu ini melahirkan politisasi melalui munculnya etnosentrisme dan fanatisme local, seperti pernyataan putra daerah yang seolah paling syah menduduki tampuk pemerintahan atau lahirnya raja-raja kecil di daerah.<sup>12</sup>

Memang banyak kritik yang dilontarkan oleh berbagai kalangan atas konsep UU No.22 tahun 1999, baik itu di kalangan NGO, akademisi dan praktisi lainnya bahkan mereka juga telah memberikan *academic draf revisi*. Di era rezim Megawati UU itu akhirnya diamanemen yang akhirnya lahir UU No.32 tahun 2004, yang substansinya jauh lebih parah dari UU yang digantikannya. UU No.32 tahun 2004 di dalamnya begitu sentralistik, dan merusak tata kelola demokrasi di dalam masyarakat yang mulai tumbuh seiring dengan angin demokrasi dan reformasi '98. Khususnya bagi masyarakat pedesaan, lembaga perwakilan desa (BPD) yang mulai menjalani kiprahnya dengan baik di desa, harus berakhir dengan kematian.<sup>13</sup>

Di desa kini tata kelolanya kembali sentralistik. Kepemimpinan komunitas melalui sosok lurah desa dihabisi karena sang lurah kini tak lagi harus mempertanggung jawabkan segala peran sosialnya dihadapan warga, namun pertanggung jawaban itu pada bupati melalui camat. Dampaknya adalah birokrasi kini sosoknya lebih dominan dan mengalahkan suara komunitas desa. Hal inilah yang membuat peringkat desa mengalami dilema ketika 'dipaksa' harus menjalani tugas sebagai pendata penduduk miskin untuk BLT yang melahirkan konflik horisontal itu. Menolak tugas dapat dianggap membangkang, menerima tugas diamuk warganya.

Birokrasi yang kembali mengalami sentralisasi disertai peniadaan hak dan otonomi komunitas pada akhirnya juga melahirkan praktek demokrasi yang semu. Lihat saja misalnya, kini hampir semua pola dan mekanisme kepemimpinan sosial melalui demokrasi langsung. Pemilu presiden

---

<sup>11</sup> John Harris, Kristian Stokke dan Olle Tornquist (eds.), *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, (Jakarta: Demos, 2005).

<sup>12</sup> Abdur Rozaki (ed), *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Berotonomi : Naskah Akademik dan Legal Drafting*, (Yogyakarta: IRE Press, 2004). Juga Abdur Rozaki dan Sutoro Eko, (eds), *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2005).

<sup>13</sup> Lihat, John T. Sidel, "Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia", dalam John Harris, dkk (eds.) *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, (Jakarta: Demos, 2005).



langsung. Pemilu kepala daerah dilakukan secara langsung pula. Janji-janji untuk mengabdikan dan memperhatikan penderitaan rakyat diucapkan untuk menarik simpati pemilih. Namun ketika berkuasa, janji itu dilupakan, rakyat kembali menjadi bulan-bulanan kebijakan politiknya. Contoh telanjang adalah pemerintahan SBY-JK, kalau saja dahulu dalam kampanyenya akan menaikkan harga BBM seperti sekarang ini pasti rakyat tidak akan memilihnya. Setelah berkuasa, SBY-JK justru memberikan kado kenaikan BBM menjelang masyarakat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ramadhan. Kebijakan ini sebagai pertanda bahwa SBY-JK lebih memperhatikan kepentingan pasar global dibandingkan dengan memperhatikan penderitaan rakyatnya, yakni dengan mengurangi besar-besaran subsidi BBM dan menaikkan setinggi 'langit' harganya.

Demokrasi makin mengalami inflasi, kualitasnya makin merosot karena sudah dibajak oleh para elite oligarkhis. Para elite ini memperdaya rakyat melalui politik pemilihan kepemimpinan. Ia mengerdikan peran parpol, mereduksi peran-peran lembaga publik lainnya melalui kuasa politik dan modal yang dimilikinya. Lihat saja dari pusat sampai di tingkatan daerah, peran saudagar atau pedagang berkolaborasi dengan eks tentara dan birokrasi tampil begitu dominan dalam tampuk pemerintahan. Para elite oligarkhis itu berkolaborasi dengan mesin pasar neoliberal untuk melakukan proses akumulasi kapital atas sumber daya alam ibu pertiwi di tengah penderitaan rakyat.<sup>14</sup> Misal, pemberian dana kompensasi BBM yang hanya 100 ribu perbulan secara terbatas di kalangan warga dengan para anggota dewan yang besarnya 10 juta perbulan. Perbandingannya hampir 100 kali lipat. DPR pun telah jatuh ke dalam pelukan mesin neoliberalisme sehingga perannya makin jauh dari membela dan melindungi rakyat.

#### IV. Konsolidasikan Kekuatan Desa

Kondisi di atas memang jangan sampai membuat rakyat tidak percaya dengan desentralisasi dan demokrasi. Mengapa? Untuk melawan sentralisasi hanya dengan paradigma desentralisasi. Begitu pula paradigma otoritarianisme yang telah membawa bangsa ini dalam kubangan krisis dan derita rakyat yang berkepanjangan hanya dapat dilawan dengan paradigma demokrasi. Persoalannya adalah bagaimana paradigma

---

<sup>14</sup> Adam B. Seligman, *The Idea of Civil Society*, (New York: Princeton University Press, 1992). Juga Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, terj. Tim IRE, (Yogyakarta: IRE Press, 2003).

desentralisasi dan demokrasi itu dalam implementasinya tidak mudah dibajak dan dikendalikan oleh para investor asing, elite oligarkhis dan *local bossism* lainnya. Lebih khusus lagi di dalam masyarakat pedesaan, dimana kultur feodalisme belum hancur sepenuhnya.

Ketika negara sudah takluk dan menjadi bagian dari kekuatan mesin pasar global, seluruh pranata demokrasi dimanipulasi maka kekuatan alternatif yang perlu dibangkitkan adalah masyarakat sipil (*civil society*).<sup>15</sup> Masyarakat sipil yang umumnya berada di dalam masyarakat pedesaan, dan ada juga di perkotaan harus bangkit dan bersatu menyusun kekuatan. Bila Karl Marx menyerukan para buruh untuk bersatu oleh penindasan kaum borjuasi<sup>16</sup> maka kini yang jatuh dan mengalami kemiskinan telah mengalami perluasan, tidak hanya kaum buruh. Kaum tani, nelayan, guru, perempuan dan anak juga mengalami proses pemiskinan. Mungkin slogan yang paling pas saat ini adalah "kaum miskin bersatulah". Lebih khusus lagi karena kemiskinan itu tersentral di desa maka orang desa harus bersatu pada melawan proses pemiskinan yang dikonstruksikan oleh struktur pasar dan negara.

Seperti apakah proses struktur pemiskinan di desa yang harus dilawan itu? Di antaranya adalah *Pertama*, orang desa harus dapat memperoleh kembali haknya dalam mengelola sumber daya alamnya. Kolaborasi negara dan pasar, seperti dalam pengelolaan tambang, migas, perkebunan, kehutanan dan lainnya sama sekali menafikan hak dan partisipasi komunitas desa dan adat. Sumber daya alam desa diserap dan dieksploitasi untuk keuntungan para pengusaha, politisi, militer dan birokrasi yang tergabung dalam lingkaran oligarkhis rezim neoliberalisme, sementara orang desa hanya kebagian sampah dan kerusakan ekologis lainnya. "kami selalu dapat air mata, sedangkan mata air selalu dinikmati Jakarta atau pengusaha", ungkap salah seorang warga desa di Nagari Sumatera Barat. Ungkapan itu sangat tepat dalam menggambarkan situasi dan penderitaan orang desa.

*Kedua*, perlunya membangun basis supra struktur dan infrastruktur ekonomi untuk mempertahankan dan melindungi produk ekonomi masyarakat desa. Tata kelola pertanian perlu kembali pada kearifan local,

---

<sup>15</sup> Karl Marx, *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*, Buku 1, diterj. Oey Hay Djoen, (Jakarta: Hasta Mitra, 2004). Dalam karya ini Karl Marx mendefinisikan kelas buruh sebagai kaum proletar, yakni kelas yang tertindas karena tidak memiliki alat produksi oleh kelas borjuasi.

<sup>16</sup> Robert Putnam, *Making Democracy Work*, (Princeton: Princeton University Press, 1993).

seperti model pertanian organik. Perbanyak organisasi yang mengurus persediaan bibit dan lumbung-lumbung padi guna menangkal ekspansi perusahaan asing. Selama ini pertanian modern, seperti penggunaan pupuk kimia, bibit transgenic hanya makin merusak ekosistem pertanian masyarakat desa. Di tambah lagi pelemahan produk pertanian oleh kebijakan pemerintah makin membuat petani berkubang penderitaan. Dampaknya, banyak petani yang menjual tanahnya akibat gagal panen atau produk pertaniannya rontok atau harganya jatuh di dalam mekanisme pasar.

*Ketiga*, modal sosial desa, seperti pranata dan kelembagaan kultural lainnya harus dapat disterilkan atau dinetralisir dari politisasi elite oligarkhis negara dan pasar agar eksistensinya dapat membela orang desa. Politisasi atas kelembagaan kultural itu makin membuat orang desa terjajah dan miskin di lingkungannya sendiri. Modal sosial desa harus terus diberi makna sebagai kekuatan untuk mendorong agar negara tetap dapat melindungi rakyatnya dari kekuatan globalisme modal.

*Keempat*, kelembagaan kultural dan organisasi lintas desa harus terus dipupuk dan dikembangkan agar masyarakat desa tidak terjebak pada fragmentasi sosial yang menciptakan perpecahan, kerontokan bersolidaritas dan sejenisnya yang semuanya itu dapat melemahkan potensi desa untuk bangkit mengatasi kemiskinan dan problem hidup lainnya.<sup>17</sup> *Kelima*, membangun kepemimpinan sosial berbasis komunitas disertai kontrak-kontrak sosial yang jelas untuk memajukan dan mengembangkan desa. Memilih pemimpin jangan seperti membeli kucing dalam karung. Artinya *track record* atau latar belakang sosialnya harus jelas. Kepemimpinan yang tidak jelas *track record*nya pada pembelaan orang desa, apalagi pola perutusan yang bersifat *top down*, harus ditolak karena dapat menciptakan penyakit dan beban bagi masyarakat desa.

Berbagai hal di atas dapat diatasi dengan cara terus berupaya untuk melakukan proses pengkondisian melalui kekuatan ide atau gagasan. Diskursus tentang perlindungan hak-hak komunitas lokal, mendorong ide *democratic governance* untuk menekan imperialisme negara donor dan perusahaan multinasional atas komunitas dan pemerintahan negara ber-

---

<sup>17</sup> Mansur Faqih, *Bebas Dari Neoliberalisme*, (Yogyakarta: Insist, 2003). Juga, Rita Abrahamsen, *Sudut Gelap Kemajuan; Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*, (Yogyakarta: Lafadl, 2005). Juga karya Grote, J.R and Gbikpi, B.,(eds), *Participatory Governance*, (Opladen: Verlag Leske-Budrich, 2002).

kembang seperti Indonesia. Negara harus kembali direbut dari kekuatan imperialisme pasar, agar perannya kembali konsisten untuk melaksanakan amanah konstitusi, yakni melindungi rakyatnya. Sembari itu juga memperkuat otonomi komunitas melalui penguatan keluarga, dan institusi pedesaan lainnya.

Untuk melakukan dan mengkonsolidasikan upaya itu memang tidak mungkin hanya dilakukan oleh orang desa sendiri karena itu diperlukan kerjasama bersama antara orang desa dengan akademisi, diplomat, intelektual (organic), gerakan mahasiswa, jurnalis, politisi negarawan, agamawan populis dan lainnya yang memiliki komitmen dan kepedulian atas penderitaan masyarakat desa. Untuk perbaikan masa depan, orang desa memang harus bangkit dan mengkonsolidasikan segala bentuk kekuatannya untuk kembali merebut hak-haknya yang telah hilang dan terampas. Sejarah perlawanan desa, komunitas lokal di dalam masyarakat desa selalu menghadirkan heroisme. Bukankah kemerdekaan NKRI dapat dikumandangkan karena perlawanan orang-orang desa dalam mengusir penjajahan? Peristiwa 10 November di Surabaya, Bandung lautan api dan masih banyak lagi adalah bukti keberanian dan kegagahan orang desa dalam berjuang. Api itu kini jangan sampai padam, perlu terus dinyalakan dan dikobarkan untuk berjuang melawan (ke)pemiskinan dari kekuatan *global capitalism*, bos-bos local dan sejenisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki (ed), 2004., *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Berotonomi : Naskah Akademik dan Legal Drafting*, Yogyakarta: IRE Press.
- Abdur Rozaki dan Sutoro Eko, (ed), 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta: IRE Press
- \_\_\_\_\_, 2005, "Gerbang Dayaku : Kisah Pembangunan Perdesaan di Kutai Kartanegara", *Laporan Penelitian Prakarsa dan Pembaharuan Pemerintahan Desa*. Kerjasama IRE Yogyakarta dengan Yayasan TIFA Jakarta.
- Abrahamsen, Rita, 2005, *Sudut Gelap Kemajuan; Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Lafadl.
- Bonie Setiawan, 2003, *Globalisasi Pertanian*, The Institute for Global Justice; Jakarta.
- Burns, Hambleton, D.R dan Hoggett, P., 1994, *The Politics of Desentralization*, London: Macmillan.



- Diamond, Larry, 2003, *Developing Democracy Toward Consolidation*, terj. Tim IRE, Yogyakarta: IRE Press
- Follesdal, Andreas, 1998, "Survey Article: Subsidiarity," *The Journal of Political Philosophy* 6 (2).
- Grote, J.R and Gbikpi, B.,(eds), 2002, *Participatory Governance*, Opladen: Verlag Leske-Budrich.
- Harris,John, Kristian Stokke dan Olle Tornquist (eds.), 2005, *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, Jakarta: Demos.
- Putnam, Robert, 1993, *Making Democracy Work*, Princenton: Princenton University Press
- Petras, James dan Henry Veltmeyer, 2003, *Globalization Unmasked : Imperialism in the 21<sup>st</sup> Century*, diterj. Agung Prihantono, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Manor, James, 1999, *The Political Economy of Democratic Decentralization: Direction in Development Series*, Washington , DC: World Bank
- Mansur Faqih, 2003, *Bebas Dari Neoliberalisme*, Insist : Yogyakarta.
- Mimin Dwiartono, 2005, "Konflik Pengelolaan Air di Umbul Wadon : Upaya Membangun Gerakan Sosial di Hulu-Hilir", dalam Jurnal Mandatory, *Politik Perlawanan*, Edisi 2/Tahun 2
- Marx, Karl, 2004, *Kapital: sebuah kritik ekonomi politik*, Buku 1, diterj.Oey Hay Djoen, Jakarta: Hasta Mitra
- Revrison Baswir, 2005, "Bahaya Globalisasi Neoliberal Bagi Negara-Negara Miskin", *Makalah pada Trainig History of Thout (HOT)*, USC Satunama, tanggal 14-19 November
- Sen, Amartya, 1999, *Development as Freedom*, New York: Knopf Books
- Sidel, John T, 2005, "Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia", dalam John Harriss, dkk (eds.) *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, Jakarta: Demos.
- Seligman, Adam B (1992) *The Idea of Civil Society*, Princeton University Press: New York.
- Tony Prasentiantono, 2003, "International Monetary Fund (IMF)", dalam I Wibowo dan F.Wahono, (ed), *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelaras.
- Tabb, K, William, 2003, *Tabir Politik Globalisasi*, diterj. Uzair Fauzan,dkk, Yogyakarta: Lafadl.

\* Penulis adalah staf pengajar Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta